



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
JALAN JENDERAL SUDIRMAN GEDUNG GUNUNG PAPAN LANTAI II
TANJUNG BALAI KARIMUN

Email : disnaker.perindustrian@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si
Jabatan : BUPATI KARIMUN
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Februari 2020

Pihak Kedua,
BUPATI KARIMUN

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**


DR. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si


Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,98%
		2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,8 %
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	3.	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru	13%
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	4.	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	15,9%
4.	Meningkatnya kesejahteraan dan Perlindungan bagi tenaga kerja	5.	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	30%
		6.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35,4%

PROGRAM

ANGGARAN

1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	766.849.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	50.000.000,-
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	40.000.000,-
4.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	700.000.000,-
5.	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp.	340.000.000,-
6.	Pengembangan Data/Informasi	Rp.	70.000.000,-
7.	Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	Rp.	200.000.000,-
8.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	290.000.000,-
9.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	905.000.000,-

10. Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp. 75.000.000,-

TOTAL ANGGARAN

Rp. 3.436.849.000,-

BUPATI KARIMUN,



H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.SI

Tanjung Balai Karimun, Februari 2020

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**



Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc